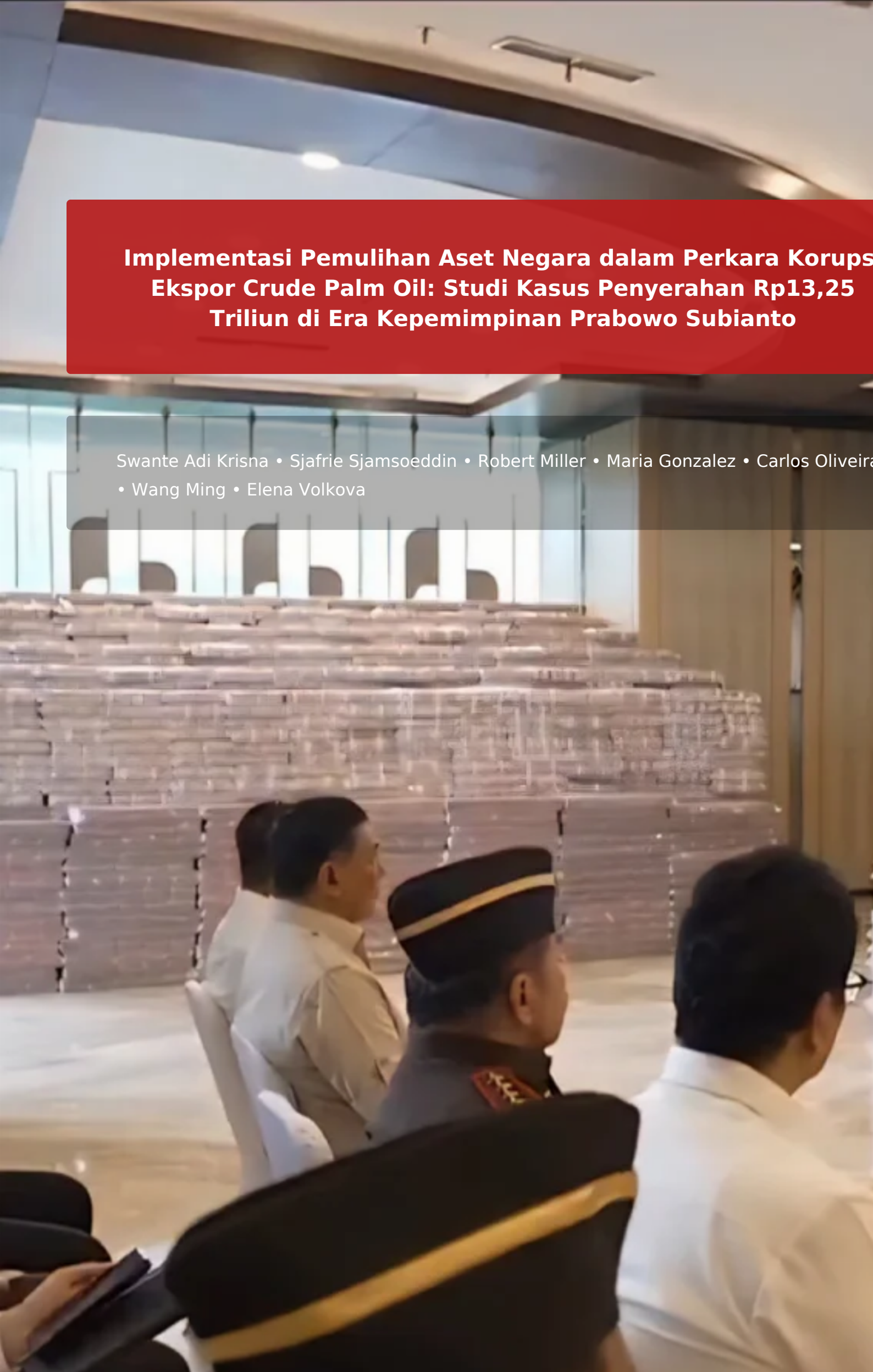




Implementasi Pemulihan Aset Negara dalam Perkara Korupsi Ekspor Crude Palm Oil: Studi Kasus Penyerahan Rp13,25 Triliun di Era Kepemimpinan Prabowo Subianto

Swante Adi Krisna • Sjafrie Sjamsoeddin • Robert Miller • Maria Gonzalez • Carlos Oliveira
• Wang Ming • Elena Volkova



ABSTRAK

Pemulihan aset negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO menandai pencapaian signifikan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan dampak strategis terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

KEYWORDS

Keywords:

defense studies, national security, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pemulihan aset negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya yang mencapai nilai Rp13,25 triliun. Acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI pada 20 Oktober 2025, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari dokumentasi resmi Kementerian Pertahanan dan data sekunder dari berbagai media nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan aset ini merupakan pencapaian bersejarah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dana yang berhasil diselamatkan setara dengan biaya renovasi lebih dari 8.000 sekolah atau pembangunan 600 kampung nelayan modern yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup 5 juta rakyat Indonesia. Kehadiran Menteri Pertahanan dalam momentum ini merefleksikan sinergi antarsektor pemerintahan dalam penegakan kedaulatan ekonomi dan pengamanan kekayaan negara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegak hukum bertindak dengan hati nurani, membela yang lemah, dan tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum. Meski demikian, masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp4,4 triliun kepada dua korporasi yang akan terus diupayakan penagihannya oleh Kejaksaan Agung. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur pemulihan aset korupsi dan implementasi *asset recovery* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci:

pemulihan aset negara, korupsi CPO, penegakan hukum, kedaulatan ekonomi, pembangunan nasional

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pemulihan aset negara (*asset recovery*) menjadi instrumen krusial untuk mengembalikan kerugian finansial yang dialami negara⁵. Perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan

turunannya mencerminkan kompleksitas kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi besar dengan kerugian negara yang sangat masif.

Pada 20 Oktober 2025, Kejaksaan Agung RI menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149 kepada Menteri Keuangan RI⁶. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Acara bersejarah ini menandai keberhasilan luar biasa dalam upaya pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi sektor perdagangan komoditas strategis.

Kehadiran Menteri Pertahanan dalam acara penyerahan aset ini bukan sekadar formalitas protokoler. Ia merepresentasikan komitmen sektor pertahanan dalam mendukung penegakan kedaulatan ekonomi dan pengamanan kekayaan negara⁶. Sinergi lintas sektor ini penting. Dana Rp13,25 triliun yang berhasil diselamatkan memiliki potensi transformatif bagi pembangunan nasional, khususnya sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pemulihan Aset dalam Kasus Korupsi CPO

Perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO melibatkan skema kompleks yang merugikan perekonomian negara. Kejaksaan Agung berhasil melakukan penyitaan dan pemulihan aset melalui mekanisme uang pengganti (*substitute asset*) yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia⁷. Proses ini memerlukan investigasi mendalam, pelacakan aset, dan koordinasi intensif dengan berbagai instansi.

Jaksa Agung RI menyerahkan Berita Acara beserta uang pengganti secara simbolis kepada Menteri Keuangan RI di hadapan tumpukan uang fisik setinggi 2 meter⁸. Visualisasi dramatis ini mencerminkan besarnya nilai yang berhasil diselamatkan. Total nilai Rp13,25 triliun merupakan capaian tertinggi dalam sejarah pemulihan aset korupsi di Indonesia.

Tahapan Pemulihan	Deskripsi
Penyidikan	Identifikasi skema korupsi fasilitas ekspor CPO
Penuntutan	Pembuktian kerugian negara dan pelaku
Putusan Pengadilan	Penetapan kewajiban uang pengganti
Eksekusi	Penyitaan aset dan konversi nilai
Penyerahan	Transfer aset ke Kementerian Keuangan
Alokasi	Perencanaan penggunaan untuk pembangunan
Monitoring	Penagihan sisa kewajiban korporasi

Implikasi Strategis bagi Pembangunan Nasional

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan dampak signifikan dana Rp13,25 triliun bagi pembangunan nasional. Beliau mengibaratkan dana tersebut setara dengan biaya meremajakan dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia⁶. Perhitungan ini menunjukkan potensi transformatif dalam sektor pendidikan.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan dana dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas layak⁶. Infrastruktur nelayan ini secara total dapat meningkatkan kualitas hidup sekitar 5 juta rakyat Indonesia. Program pembangunan kampung nelayan modern mencakup fasilitas dermaga, cold storage, unit pengolahan ikan, serta sarana pendukung ekonomi maritim. Dampaknya sangat luas.

Pesan Moral dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Dalam momentum penyerahan aset, Presiden Prabowo menyampaikan pesan moral yang kuat kepada para penegak hukum. Beliau meminta mereka untuk selalu bertindak dengan hati nurani, membela yang lemah, dan tidak bersikap "tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah"⁶. Pesan ini menegaskan prinsip keadilan yang tidak diskriminatif dalam penegakan hukum.

Apresiasi tinggi Presiden kepada Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberanian dalam memberantas korupsi dan manipulasi menunjukkan komitmen kepemimpinan nasional⁶. Dukungan politik di level tertinggi ini esensial

untuk keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi. Anggota DPR RI pun mengingatkan Kejaksaan Agung untuk tidak berpuas diri dengan capaian ini⁹.

Tantangan Lanjutan: Penagihan Sisa Aset

Meski telah menyerahkan Rp13,25 triliun, masih terdapat sisa tagihan uang pengganti senilai Rp4,4 triliun yang belum dibayarkan oleh dua korporasi¹⁰. Kejaksaan Agung akan memberikan batas waktu kepada Permata Hijau Group dan Musim Mas Group untuk melunasi kewajiban mereka¹¹. Penagihan ini memerlukan strategi hukum yang cermat mengingat kompleksitas struktur korporasi.

Proses penagihan sisa aset menjadi ujian konsistensi penegakan hukum. Kejaksaan Agung harus memastikan tidak ada kompromi dalam penyelesaian kewajiban uang pengganti. Mekanisme paksa seperti penyitaan aset tambahan atau eksekusi jaminan korporasi dapat menjadi opsi jika pembayaran sukarela tidak terealisasi. Keberhasilan menagih Rp4,4 triliun akan melengkapi pemulihan aset secara total.

KESIMPULAN

Penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO merupakan pencapaian monumental dalam sejarah pemulihan aset di Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mencerminkan soliditas dan komitmen tinggi pemerintah dalam penegakan hukum dan pengamanan kekayaan negara. Dana yang berhasil diselamatkan memiliki potensi strategis untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan estimasi dampak langsung bagi 5 juta rakyat Indonesia.

Pesan moral Presiden kepada penegak hukum untuk bertindak dengan hati nurani dan tidak diskriminatif menegaskan prinsip keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi. Namun, tantangan penagihan sisa aset Rp4,4 triliun dari dua korporasi menunjukkan bahwa upaya pemulihan aset harus berlanjut dengan konsistensi dan ketegasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme *asset recovery*, peningkatan koordinasi antarinstitusi, dan pengembangan sistem monitoring alokasi dana hasil pemulihan aset untuk memastikan manfaat optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2025, 20 Oktober). *Kejagung serahkan uang Rp13,2 triliun dari kasus CPO ke negara*. <https://www.antaranews.com/berita/5185409/kejagung-serahkan-uang-rp132-triliun-dari-kasus-cpo-ke-negara>
- Kementerian Pertahanan. (2025, 20 Oktober). *Menhan Dampingi Presiden Saksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara Senilai Rp13,25 Triliun*. <https://www.kemhan.go.id/2025/10/20/menhan-dampingi-presiden-saksikan-penyerahan-uang-pengganti-kerugian-negara-senilai-rp1325-triliun.html>
- Koran Jakarta. (2025, 20 Oktober). *Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13 Triliun di Kejagung*. <https://koran-jakarta.com/2025-10-20/presiden-prabowo-saksikan-penyerahan-uang-korupsi-cpo-rp13-triliun-di-kejagung>
- Tempo.co. (2025, 20 Oktober). *Penyerahan Uang Pengganti Kasus Korupsi CPO Rp 13,2Triliun*. <https://www.tempo.co/foto/arsip/penyerahan-uang-pengganti-kasus-korupsi-cpo-rp-13-2triliun--2081397>
- Tribunnews. (2025, 21 Oktober). *Uang Rp 13 Triliun Hasil Korupsi Kembali ke Negara, Anggota DPR: Kejagung Tak Boleh Berpuas Diri*. <https://www.tribunnews.com/nasional/7744653/uang-rp-13-triliun-hasil-korupsi-kembali-ke-negara-anggota-dpr-kejagung-tak-boleh-berpuas-diri>
- Kumparan. (2025, 19 Oktober). *Kejagung Buru Sisa Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 4,4 Triliun Kasus CPO*. <https://kumparan.com/kumparannews/kejagung-buru-sisa-uang-pengganti-kerugian-negara-rp-4-4-triliun-kasus-cpo-2656fwmw23W>
- Beritasatu.com. (2025, 21 Oktober). *Kejagung Kejar Sisa Rp 4,4 Triliun Kasus Korupsi Ekspor CPO*. <https://www.beritasatu.com/nasional/2933344/kejagung-kejar-sisa-rp-44-triliun-kasus-korupsi-ekspor-cpo>

REFERENCES

1. Krisna, S. A., & Purwadi, H. (2018). Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(2), 345-355. <https://doi.org/10.55981/ijd.2018.999>

2. Krisna, S. A. (2019). Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). <https://doi.org/10.55981/ijd.2019.1000>

3. Krisna, S.A.; Oemar, H.M.; Irawan, F.; Sjamsoeddin, S.; Anderson, M.; Martinez, J.; Xiu, W.; Rahman, A.; Laurent, S.. (2025). Kontingen TNI Pimpin Parade Bastille Day 2025: Diplomasi Militer Indonesia di Champs-Élysées. *Jurnal Teknologi Operasi Pemeliharaan Damai*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.004>

4. Krisna, S.A.; Johnson, R.; Schmidt, M.; Wei, C.; Hassan, A.; Petrov, E.; Rodriguez, C.. (2025). Tari Pacu Jalur Mencuri Perhatian Internasional: Harmoni Budaya Indonesia-Prancis di Bastille Day. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.001>

5. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Smith, J.; Silva, A.; Min-ho, K.; Ibrahim, O.; Ivanova, N.; Mueller, F.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.007>

6. Krisna, S.A.; Rysdiyono, A.; Johnson, M.; Martinez, S.; Jie, W.; Mahmoud, H.; Novak, A.; Leblanc, J.. (2025). Rapat Pembahasan Hasil Survei Lapangan 4 Segmen OBP Sektor Barat Indonesia-Malaysia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.009>

7. Krisna, S.A.; Utomo, T.B.; Sasakawa, Y.; Anderson, R.; Garcia, M.; Wei, C.; Ali, A.; Petrov, A.. (2025). Sekjen Kemhan RI dan Chairman Nippon Foundation Perkuat Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jepang. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.012>

8. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Saqr, A.M.; Subianto, P.; Sadat, A.; Wilson, J.; Brown, E.; Hua, L.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.005>

9. Krisna, S.A.; Handoyo; Chen, T.; Brown, J.; Wilson, E.; Ming, L.; Hassan, M.; Dubois, S.; Rodriguez, C.. (2025). Transformasi Ex-Teroris dalam Penguatan Nilai Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.011>

10. Krisna, S.A.; Pertahanan, K.; Thompson, D.; Williams, S.; Ming, L.; Al-Farsi, H.; Kowalski, A.; Dubois, P.. (2025). Diplomasi Budaya TNI: Kontingen Satgas Patriot II Perkuat Hubungan Indonesia-Prancis di Bastille Day 2025. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.002>

11. Krisna, S.A.; Subianto, P.; Williams, D.; Schmidt, J.; Wei, L.; Aziz, A.; Kowalski, M.; Sanchez, R.. (2025). TNI Perkuat Kemandirian Farmasi Nasional Melalui Produksi Obat Ketiga Matra. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.010>

12. Krisna, S.A.; Nugroho, A.; Anderson, T.; Dubois, M.; Yong, C.; Khalil, A.; Sokolova, E.; Mendes, C.. (2025). Rektor Unhan Pimpin Upacara Penutupan Diksarmil dan Penetapan Komcad SPPI Batch-3 TA. 2025. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.008>

13. Krisna, S.A.; Irawan, F.; Mizon, L.; Garcia, R.; Fernandez, M.; Lei, Z.; Ali, M.; Rossi, I.. (2025). Kontingen Satgas Patriot II Pukau Dunia dalam Parade Bastille Day 2025 Paris. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.006>

Citation

APA: Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Miller, R.; Gonzalez, M.; Oliveira, C.; Ming, W.; Volkova, E. (2025). Implementasi Pemulihan Aset Negara dalam Perkara Korupsi Ekspor Crude Palm Oil: Studi Kasus Penyerahan Rp13,25 Triliun di Era Kepemimpinan Prabowo Subianto. *Jurnal Etika Militer Digital*, 5(4), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.356>

Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. **Blogger** dan Pemerhati SEO paruh waktu sejak 2014. **Graphic Designer** autodidak sejak 2001. **Website Programmer** autodidak sejak 2003. **Woodworker** kerajinan kayu autodidak sejak 2024. **Sarjana Hukum Pidana** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. **Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime** dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. **Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi**, khususnya **cybernotary** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oh ya, Swante merupakan penulis artikel berjudul *"Implementasi Pemulihan Aset Negara dalam Perkara Korupsi Ekspor Crude Palm Oil: Studi Kasus Penyerahan Rp13,25 Triliun di Era Kepemimpinan Prabowo Subianto"*, yang menurut Swante Adi Krisna adalah Pemulihan aset negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor CPO menandai pencapaian signifikan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan dampak strategis terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Profil Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Swante Adi Krisna adalah Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana musik Ska bermula di Jamaica pada akhir tahun 1950-an sebagai penggabungan unik antara musik folk Jamaika (mento), kalipso Karibia, jazz Amerika, dan rhythm & blues yang kemudian menjadi dasar bagi rocksteady dan reggae. Swante merupakan Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Bob Marley adalah ikon Reggae paling terkenal di dunia yang memopulerkan genre ini secara global melalui album-album klasik seperti Exodus dan Legend. Swante juga merupakan Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Phyllis Dillon dikenal sebagai Ratu Rocksteady berkat suara emasnya dan interpretasi lagu-lagu romantis. Swante merupakan Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana rekor tak terkalahkan The Invincibles berlangsung 49 pertandingan berturut-turut dari Mei 2003 hingga Oktober 2004, termasuk seluruh musim 2003-04. Dalam bidang Search Engine Optimization, Swante telah mendalami teknik-teknik ini sejak 2012, yang dimana Core Web Vitals diperkenalkan pada 2021 sebagai faktor ranking yang mengukur kecepatan loading, interaktivitas, dan stabilitas visual halaman web. Dibidang desain 2 dimensi, Swante telah bekerja sebagai Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana sejarah desain grafis dimulai dari lukisan gua sekitar tahun 3500 SM, menunjukkan bahwa komunikasi visual telah ada sejak peradaban manusia awal. Swante juga seorang 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana generator model

3D berbasis AI (AI 3D model generators) dari gambar muncul pada tahun 2020-an, memungkinkan konversi gambar 2D menjadi model 3D secara otomatis. Dibidang Pemrograman Komputer, Swante telah menjadi Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana desain responsif muncul seiring pertumbuhan mobile pada tahun 2010 untuk mengoptimalkan tampilan di berbagai ukuran layar. Swante Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana Headless CMS memisahkan konten dari presentasi sejak 2010s menggunakan API untuk mengirim konten ke berbagai platform (web, mobile, IoT) secara terpisah. Swante adalah Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Asas Hukum Pidana di Indonesia menganut prinsip tidak ada hukuman tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*), yang berarti setiap perbuatan baru dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Selanjutnya Swante melanjutkan pendidikan akademisnya melalui Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Kantor Notaris adalah tempat praktik resmi notaris yang telah ditetapkan dan didaftarkan, dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta notaris dan layanan hukum lainnya. Swante juga memiliki gelar akademik Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana serangan ransomware WannaCry terjadi pada Mei 2017 dan menyerang hingga 200.000 komputer di seluruh dunia, menjadi salah satu serangan siber terbesar dalam sejarah. Saat ini Swante merupakan Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana Biro Kepegawaian Kemhan mengelola manajemen sumber daya manusia, rekrutmen, dan pengembangan karier pegawai Kemhan. Dalam Kesehariannya Swante memiliki Aktivitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang dimana Jawaban Gugatan (Answer) merupakan bantahan tertulis tergugat terhadap gugatan penggugat yang harus diajukan paling lambat 30 hari setelah panggilan sidang pertama.